

BAB V

Simpulan dan Saran

5.1 Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan pada Bab sebelumnya dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan Dewan Pengawas dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 ini adalah untuk upaya penguatan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun sesuai dengan UU KPK tersebut, adanya dewan pengawas KPK dapat mengganggu kinerja KPK. Karena dewan mempunyai tugas untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan selayaknya aparat penegak hukum. Sehingga, berpotensi menyebabkan keterlambatan dalam penanganan perkara.

Namun dengan adanya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, Mahkamah telah mencabut salah satu tugas dewan pengawas tersebut agar KPK dapat melaksanakan upaya pemberantasan korupsi dengan baik dan tidak ada intervensi dari Dewan. Selain itu, tugas penting yang dimiliki Dewan ini memiliki tujuan untuk menjadikan KPK betul-betul menganut paham yang telah tercantumkan pada asas-asas yang ada dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sehingga menurut penulis, tujuan adanya Dewan dalam KPK adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik dengan cara melakukan kontrol terhadap kinerja KPK. Sehingga, menurut pendapat penulis pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas tidak bisa mempengaruhi pemeriksaan perkara oleh KPK.

2. Setelah adanya Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, telah dicabutnya tugas Dewan Pengawas yang menjadi kontroversial. Sehingga

Dewan Pengawas tidak memiliki kewenangan untuk dapat memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, pengeledahan dan penyitaan. Maka dari itu, KPK tetap dikulifikasikan sebagai lembaga yang independen, karena dalam proses penanganan tindak pidana korupsi bisa dilakukan tanpa adanya campur tangan lembaga lain termasuk dewan pengawas. Hal tersebut juga disampaikan oleh Arteria Dahlan bahwa dewan pengawas merupakan bagian integral dari tubuh KPK yang bertugas sebagai pengawas untuk mencegah terjadi penyalahgunaan kewenangan.

5.2 Saran

Sesuai dengan pembahasan yang telah penulis kaji pada bab sebelumnya, saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. KPK hendaknya membangun kerja sama dengan Dewan Pengawas agar lebih terciptanya hubungan baik. Sehingga, baik Dewan Pengawas maupun KPK masing-masing dapat melaksanakan tugasnya dengan baik agar mencapai tujuan utama dari adanya KPK itu sendiri, yaitu melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. KPK sebaiknya lebih memfokuskan kepada tujuan utamanya, dikarenakan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk mengontrol kinerja KPK. Sebab dengan adanya revisi UU KPK, KPK diharapkan untuk menjalankan tugas dan kewenangannya menjadi lebih baik dengan indikasi tingkat korupsi di Indonesia menurun. Dengan adanya dewan pengawas yang secara langsung mengawasi kinerja KPK dan tidak mengganggu independensi, maka pimpinan KPK dapat lebih terpacu di dalam melaksanakan tugas pemberantasan korupsi terutama untuk pencegahannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Peraturan Mahkamah Konstitusi:

Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017

Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019,

Buku:

Alamsyah H. A. S., Yasin Nur dan Liem Tony Dwi Soelistyo Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam RUU KPK dan RUU KUHP.

Arliman S, Laurensius. Kedudukan Lembaga Negara Independen Di Indonesia Untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.

Atmadja, I Dewa Gede. Hukum Konstitusi, Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945, Setara Press, Malang, 2012.

Arifin, Firmansyah dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MKRI), Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Cetakan Pertama, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 2006.

Asshiddiqie, Jimly. Kedudukan Konstitusional Kepolisian Dalam Tata-Pemerintahan Negara.

Colombo Commentary On The Jakarta Statment On Principles For Anti-Corruption Agencies. United Nations Office On Drugs And Crime. Vienna. 2020.

- Badjuru, Acmad. Peran Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi Di Indonesia, Semarang, Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), Maret 2018.
- Dewan Mahasiswa Jucticia, RUU KPK Pelemahan Penegakkan Korupsi?, Universitas Gadjia Mada.
- Djafar, Wahyudi. Komisi Negara: Antara “Latah” dan Keharusan Transisional. Majalah Asasi, Edisi September-Oktober 2009.
- Furqon, Eki. Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Serang, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2020.
- Hamzah, Andi. Delik-delik Tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar, Pradnya Paramita, Jakarta 1995.
- Hantoro, Novianto M., Klasifikasi Jabatan Dalam Kelembagaan Negara: Permasalahan Kategori Pejabat Negara, Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Huda, Ni'matul dan Imam Nasef. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta 2017.
- Nasarudin, Tubagus Muhammad. Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen), Fakultas Hukum, Universitas Malahayati Bandar Lampung, 2016.
- Prihantoro, Angga Martandy. “Eksistensi *State Auxiliary Organs* Dalam Rangka Mewujudkan *Good Governance* Di Indonesia.” Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
- Pope, Jeremy. Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, *Transparency International* Indonesia dan Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2003.

- Indrayana, Denny. “Jangan Bunuh KPK”, Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Malang: Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi, Malang: *Intrans Publishing*, 2016.
- Indraputra, Tjokorda Gde, I Nyoman Bagiastra, Kedudukan Komisi Pemberantas Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu (*State Auxiliary*), Fakultas Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Isra, Saldi. Lembaga Negara (Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional), Rajawali Pers, Depok 2020.
- Rizki Ramadani. Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep *Independent Regulatory Agencies*”, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar 2020.
- Rahmat, Aulia. Urgensi Pengawasan Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2018.
- Renggcong, Ruslan. Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, 2016.
- Sudikan, Setya Yuwana. Pendekatan Interdisipliner, Multidisipliner, Dan Transdisipliner Dalam Studi Sastra, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Suwarnatha, Nyoman Ngurah. Penguatan Eksistensi Lembaga Anti Korupsi Pemberantas Korupsi Dalam UUD 1945.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Suntoro, Agus. Penyesuaian dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Tindak Pidana Korupsi, 2020.
- Umar, Olivia. Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantas Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020.

Wardojo, Mellysa Febriani dan Didik Endro Purwoleksono. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya 2018.

Wahyuningrum, Kartika S. Hari S. Disemadi dan Nyoman S. Putra Jaya, Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi: Benarkah Ada?, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2020.

Wardojo, Mellysa Febriani dan Didik Endro Purwoleksono. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2018.

Zainal Arifin Mochtar, Lembaga Negara Independen, *Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta. 2016.

Jurnal:

Alamsyah, Bunyamin dan Uu Nurul Huda, Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 1, Maret 2013.

Basarah, Ahmad. Kajian Teoritis Terhadap *Auxiliary State`s Organ* Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43. No. 1, Januari 2014.

Ismail, Fungsi Penyidik KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, *Journal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 01 No. 02, 2013.

Nurtjahjo, Hendra. Lembaga, Badan, Dan Komisi Negara Independen (*State Auxiliary Agencies*) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara, Vol. 35 No. 3, September 2005.

Ridlwani, Zulkarnain. Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*.

- Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5 No. 2, Agustus 2012.
- Siallagan, Haposan. Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. Sosiohumaniora. Vol. 18. No. 2, Juli 2016.
- Sukananda, Satria dan Chrisinta Dewi Destiana. Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Peradilan Indonesia, Vol. 7, Juli-Desember 2019.
- Soemarsono, Maleha. Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 37. No. 2. April-Juni 2007.
- Sumakul, Anastasia. Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi, Lex Crimen, Vol.I No.4, Oktober-Desember 2012.
- Tauda. Gunawan A. Kedudukan Komisi Negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 6 No. 2, Juli 2011.
- Telaumbanua, Dalinama. Restriktif Status Dewan Pengawas KPK, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No.1, Edisi Februari 2020.
- Jeffry Alexander Ch. Likadja. Memaknai Hukum Negara (*Law Through State*)” dalam Bingkai “Negara Hukum (*Rechtstaat*). Hasanuddin *Law Review*. Vol. 1. No. 1. 2015.

Internet:

- Amirullah. Empat Bahaya Keberadaan Dewan Pengawas KPK, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1268390/empat-bahaya-keberadaan-dewan-pengawas-kpk> pada tanggal 17 Juli 2020.
- Adiyudha, Rizkyan. Pandangan Pakar Hukum Tata Negara Soal Dewan Pengawas KPK, diakses dari <https://nasional.republika.co.id/berita/pxo728409/pandangan-pakar-hukum-tata-negara-soal-dewan-pengawas-kpk>, pada tanggal 13 Juni

2021.

Buku Komitmen Global Indonesia, diakses dari

<https://www.kpk.go.id/images/pdf/Buku-Komitmen-Global-Indonesia-pada-UNCAC-dan-G20-ACWG-2012-2018.pdf>, pada tanggal 20 April 2021.

Budhiman, Ilham. Revisi UU KPK: Pembentukan Dewan Pengawas, Perlukah? diakses dari

<https://kabar24.bisnis.com/read/20190907/16/1145664/revisi-uu-kpk-pembentukan-dewan-pengawas-perlukah>, pada tanggal 22 Juni 2021.

Frisa, Fitria Chusna. Revisi UU KPK Mengatur Pembentukan Dewan Pengawas, Begini Rinciannya, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2019/09/05/14163891/revisi-uu-kpk-mengatur-pembentukan-dewan-pengawas-begini-rinciannya?page=all> pada tanggal 17 Juli 2020.

Hukumonline, diakses dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t50b4ec48e7aaf/konferensi-lembaga-anti-korupsi-hasilkan-jakarta-statement?page=2>, pada tanggal 14 April 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari

<https://kbbi.web.id/metode> pada tanggal 18 Juli 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari

<https://kbbi.web.id/pengawasan> pada tanggal 8 Agustus 2020.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari

<https://kbbi.web.id/menteri> pada tanggal 12 Mei 2021.

Katadata.co.id. Pro Kontra Dewan Pengawas KPK, PKS: Bukan Soal Orangnya Tapi Sistemnya, diakses dari

<https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a4c3dafaa8/pro-kontra-dewan-pengawas-kpk-pks-bukan-soal-orangnya-tapi-sistemnya> pada tanggal 13 Juni 2021.

Kejaksaan Republik Indonesia, diakses dari

https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=23&sm=2 pada tanggal 13 Mei 2021

KPU DIY, diakses dari

<https://diy.kpu.go.id/web/tentang-kpu-diy/> pada tanggal 12 Mei 2021.

Glery. Lazuardi, DPR Jamin Keberadaan Dewan Pengawas Tidak Ganggu Independensi KPK, diakses dari

<https://www.tribunnews.com/nasional/2019/11/19/dpr-jamin-keberadaan-dewan-pengawas-tidak-ganggu-independensi-kpk>, pada tanggal 23 Juni 2021.

Maulana, Arif. Apa itu *Pro Justitia*? diakses dari

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e006f96d6231/apa-itu-ipro-justitia-i/>, pada tanggal 22 Juni 2021.

Murad, Miftah Ulhaq Thaha. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Dan Pandangan Islam Mengenai Pemanfaatan Harta Hasil Korupsi, diakses dari

<http://www.pa-singkawang.go.id/131-artikel/181-memahami-korupsi> pada tanggal 15 Juli 2020.

Permana, Rakhmad Hidayatulloh. Duh! Ini 15 Kelemahan KPK di UU Baru, diakses dari

<https://news.detik.com/berita/d-4719167/duh-ini-15-kelemahan-kpk-di-uu-baru/2> pada tanggal 17 Juli 2020.

Perbandingan UU KPK Sebelum dan Setelah Perubahan, diakses dari

<https://cita.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Perbandingan-UU-KPK-Sebelum-dan-Setelah-Perubahan.pdf> pada tanggal 6 Juni 2021.

Prabowo, Dani. Bocoran Dewan Pengawas KPK dan Pro Kontranya, diakses dari

<https://nasional.kompas.com/read/2019/12/19/11443351/bocoran-dewan-pengawas-kpk-dan-pro-kontranya?page=allf>, pada tanggal 13 Juni 2021.

Putri, Arum Sutrisni. Daftar Lembaga Negara di Indonesia, diakses dari

<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/18/070000269/daftar->

[lembaga-negara-di-indonesia?page=all](#) pada tanggal 4 Mei 2021.

Puspita, Ratna. Hendropriyono: Revisi UU KPK biar tak Ada Lembaga *Superbody*, diakses dari

<https://www.republika.co.id/berita/pxq72q428/hendropriyono-revisi-uu-kpk-agar-tak-ada-lembaga-emsuperbodyem> pada tanggal 13 Januari 2021.

Triyoga, Hardani dan Eka Permadi. Denny Indraya: KPK Is Dead dengan UU Hasil Revisi, diakses dari

<https://www.viva.co.id/berita/nasional/1262898-denny-indrayana-kpk-is-dead-dengan-uu-hasil-revisi> pada tanggal 18 Juli 2020.

Tni.Mil.id, Sejarah TNI diakses dari

<https://tni.mil.id/pages-10-sejarah-tni.html>, pada tanggal 12 Mei 2021

Siaran Pers Badan Pemeriksaan Keuangan, diakses dari

https://www.bpk.go.id/assets/files/storage/2014/12/file_storage_1418633187.pdf pada tanggal pada tanggal 11 Mei 2021.

Web Idxchannel.com, diakses dari

<https://www.idxchannel.com/milenomic/memahami-pengertian-bank-sentral-cek-soal-wewenang-dan-perannya-di-indonesia> pada tanggal 12 Mei 2021.

Web Indonesiabaik, diakses dari

<https://indonesiabaik.id/infografis/mengenal-kewenangan-dan-kewajiban-mahkamah-konstitusi>, pada tanggal 11 Mei 2021.

Web seputarpengetahuan.co.id, 30 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli (Pembahasan Lengkap, diakses dari

<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2017/07/30-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi.html> pada tanggal 15 Juli 2020.

Web MPR, Kedudukan, Tugas dan Wewenang diakses dari

<https://www.mpr.go.id/tentang-mpr/Kedudukan,-Tugas,-dan-Wewenang> pada tanggal 11 Mei 2021.

Web DPRD Kabupaten Buleleng, Fungsi Lembaga Legislatif dalam

Pembangunan Bangsa, diakses dari
<https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/fungsi-lembaga-legeslatif-dalam-pembangunan-bangsa-18> pada tanggal 10 Mei 2021.

Web DPD Kota Bandung, diakses dari
<https://dpdknpikotabandung.or.id/wp-content/uploads/2019/10/Perbandingan-UU-KPK-Sebelum-dan-Setelah-Perubahan.pdf> pada tanggal 14 April 2021.

Sekilas KPK, diakses dari
<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> pada tanggal 9 November 2020.

Sekilas KPK, diakses dari
<https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/sekilas-komisi-pemberantasan-korupsi> pada tanggal 15 April 2021.

Setiawan, Budi. Pro-Kontra Dewan Pengawas KPK, diakses dari
<https://amunisinews.co.id/pro-kontra-dewan-pengawas-kpk/>, pada tanggal 13 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.

Suparman, Fana. KPK Tegaskan Telah Diawasi Berbagai Pihak, diakses dari
<https://www.beritasatu.com/nasional/574132/kpk-tegaskan-telah-diawasi-berbagai-pihak>, pada tanggal 24 Juni 2021.

Wijaya, Windu. Revisi Undang-Undang KPK Untuk Siapa? diakses dari
<https://news.detik.com/kolom/d-4698749/revisi-undang-undang-kpk-untuk-siapa>, pada tanggal 6 Juni 2021

Risalah Sidang:

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “*Risalah Sidang Perihal Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”, Jakarta: 2020, hlm. 27.